

jk



Koordinasi & Desiminasi Penyuluhan



Oleh:
Ir. RR. Retno Widowati

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur

RINGKASAN

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pertanian dan pelaksanaan program pembangunan pertanian tersebut maka sangat diperlukan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri: mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, dedikasi, disiplin, dan etos kerja yang tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, terutama SDM petani yaitu melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Kegiatan penyuluhan pertanian meliputi: (1) Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis; (2) Memberikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses petani dan keluarganya ke sumber-sumber informasi dan sumberdaya yang akan membantu mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi; (3) Membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan; (4) Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh; dan (5) Menjadikan kelembagaan penyuluhan sebagai lembaga mediasi dan intermediasi, terutama yang menyangkut teknologi dan kepentingan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

Untuk itu BPTP Kaltim melakukan koordinasi dilaksanakan di Forum pertemuan diawali dengan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait di daerah baik secara langsung maupun via telepon. Sementara kegiatan diseminasi teknologi hasil penelitian dan pengkajian telah dilakukan dalam bentuk siaran di media massa (TV, Radio, Website, dan Medsos). Dan pada akhirnya percepatan penyebaran inovasi pertanian di Provinsi Kaltim dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan stakehoders serta meningkatkan kapasitas penyuluh.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dalam 5 tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-tiga (2015-2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran visi, program aksi Presiden/Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

Visi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita).

Berdasarkan rincian dari Nawa Cita, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu 1) Peningkatan Agroindustri, dan 2) Peningkatan Kedaulatan Pangan. Sasaran dari peningkatan agroindustri yakni meningkatnya Produk Domestic Bruto (PDB) industry pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produksi pertanian di ekspor, berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015 – 2019 meliputi tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan, tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan, terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu hektar untuk menggantikan alih fungsi lahan, terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta hektar jaringan irigasi, beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta hektar, serta terbangunnya 132 ribu hektar layanan jaringan irigasi rawa.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, pengembangan dan perluasan logistic benih/ bibit, penguatan kelembagaan petani, pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, pengembangan

dan penguatan bioindustri dan bioenergi, penguatan jaringan pasar produk pertanian. Untuk peningkatan dampak ekonomi secara signifikan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan kawasan dan fokus komoditas (Biro Hukum Dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, 2015).

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Nawa Cita di atas, salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian adalah Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale). Untuk mensukseskan Upsus Pajale ini, diperlukan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri mandiri, professional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin, dan moral yang tinggi serta berwawasan global.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM pertanian, terutama SDM petani adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pendidikan non – formal bagi petani dan keluarganya sebagai wujud jaminan pemerintah atas hak petani untuk mendapatkan pendidikan.

Penyelenggaraan koordinasi dan pemberdayaan penyuluhan dimaksudkan untuk mewujudkan system penyuluhan pertanian yang menjamin terselenggaranya penyuluhan pertanian secara produktif, efektif dan efisien, serta menjadikan penyuluh pertanian sebagai konsultan dan pendamping petani dalam rangka mensukseskan program – program Kementerian Pertanian di tahun 2015 ini dan tahun – tahun berikutnya. Pembangunan pertanian dalam 5 tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke – tiga (2015 – 2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran visi, program aksi Presiden/ Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.

1.2. Dasar Pertimbangan

Pembangunan pertanian tidak akan bisa berjalan lancar kalau tidak didukung oleh adanya sistem penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui proses pembelajaran agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya, memiliki akses ke sumber informasi, teknologi, dan

sumberdaya lainnya untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya (DPR RI, 2005).

Agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif, dan efisien, maka diperlukan rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam bentuk program penyuluhan pertanian yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pemerintah dan memadukan pendayagunaan sumberdaya serta penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada. Program Penyuluhan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mewadahi dan memadukan sumberdaya guna memfasilitasi terselenggaranya penyuluhan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur.

Seiring dengan kebijaksanaan tersebut, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan di bidang pertanian (antara lain penyuluhan pertanian) merupakan kewenangan yang bersifat opsional dan concurrent sehingga perlu diwujudkan dalam tata hubungan yang serasi dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pertanian dan pelaksanaan program pembangunan pertanian tersebut maka sangat diperlukan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri: mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, dedikasi, disiplin, dan etos kerja yang tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, terutama SDM petani yaitu melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Kegiatan penyuluhan pertanian meliputi: (1) Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis; (2) Memberikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses petani dan keluarganya ke sumber-sumber informasi dan sumberdaya yang akan membantu mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi; (3) Membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan; (4) Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh; dan (5) Menjadikan kelembagaan penyuluhan sebagai lembaga mediasi dan intermediasi, terutama yang menyangkut teknologi dan kepentingan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

1.3. Tujuan Kegiatan

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dengan dinas/ instansi/stakeholder pembangunan pertanian baik di pusat maupun yang ada di daerah.
- b. Mendiseminasikan teknologi hasil pengkajian BPTP Kalimantan Timur ke masyarakat luas.

1.4. Keluaran

- a. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dengan dinas/ instansi terkait di pusat maupun di daerah .
- b. Terdiseminaskannya teknologi hasil pengkajian BPTP Kalimantan Timur ke masyarakat luas.

1.5. Manfaat Dan Dampak

- a. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dengan dinas/ instansi terkait di pusat maupun di daerah .
- b. Percepatan diseminasi teknologi hasil pengkajian dan terinventarisasinya umpan balik kegiatan BPTP Kalimantan Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Falsafah Penyuluhan Pertanian

Kata "falsafah" ternyata memiliki pengertian yang sangat beragam. Butt (1961), mengartikan falsafah sebagai suatu pandangan hidup. Sedang Dahama dan Bhatnagar (1980), mengartikan falsafah sebagai landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan di dalam praktek. Sedangkan Soekandar (1973) mengartikan falsafah secara umum adalah suatu upaya untuk mencari landasan berfikir, melalui suatu pemikiran dan renungan yang mendalam. Sebagai hasilnya diperoleh suatu landasan berfikir yang dianggap benar, patut, wajar dan sesuai.

Berkaitan dengan itu, Kelsey dan Hearne (1955) menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa: *falsafah penyuluhan adalah: bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia*. Falsafah penyuluhan pertanian merupakan dasar pengertian, yakni dasar untuk melakukan kegiatan dan dasar untuk bekerja (Soekandar, 1973).

Menurut Soekandar (1973) sejalan dengan pengertian/ batasan umum tentang falsafah, maka falsafah penyuluhan pertanian terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan

Pendidikan yang dimaksud bukan pendidikan yang umum, namun merupakan pendidikan luar sekolah bagi orang dewasa yang sering disebut sebagai pendidikan non formal. Sasaran pendidikan ini adalah para petani dan keluarganya yang umumnya adalah orang-orang dewasa, maka berlakulah kaidah-kaidah bagaimana orang dewasa belajar.

Pendidikan non formal pada penyuluhan pertanian, dimaksudkan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku petani agar tercapai kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan pertanian yang berorientasi pada agribisnis. Perilaku yang dimaksudkan meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap petani yang dijadikan sasaran penyuluhan pertanian.

Sebagai proses pendidikan, di Indonesia juga dikenal adanya filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantoro yang berbunyi:

- a. *Ing ngarso sung tulodho*, mampu memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat sarasannya;
- b. *Ing madya mangun karso*, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba;
- c. *Tut wuri handayani*, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat petaninya, sepanjang tidak menyimpang/meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya.

Bertolak dari pemahaman bahwa penyuluhan merupakan salah satu sistem pendidikan, untuk mengkaitkan falsafah penyuluhan dengan pendidikan yang memiliki falsafah; idealisme, realisme, dan pragmatisme,. maka penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis, disamping itu penyuluhan pertanian harus selalu mengacu kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapangan atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.

2. Penyuluhan sebagai proses demokrasi

Pengertian demokrasi dalam hal ini adalah sebagai suatu proses mencari kata sepakat dari orang-orang atau kelompok orang dalam mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama berdasarkan kehendak dan keinginan dari orang banyak. Petani tidak dapat dipaksa oleh petugas pertanian agar mau menerima dan menerapkan sesuatu. Petani berhak memutuskan sendiri segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan pertimbangan, kerjasama dan musyawarah, dengan demikian penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama dengan petani dan membantunya dalam melaksanakan kegiatan usahatani.

Melalui kegiatan penyuluhan pertanian di pedesaan bagi petani dan keluarganya, secara tidak langsung telah menanamkan dasar-dasar demokrasi, karena petani sebagai sasaran kegiatan penyuluhan dapat memilih, menentukan, dan memutuskan usahatani yang akan diusahakan. Dengan falsafah ini hubungan antara petani dan penyuluh merupakan hubungan kemitraan (*partnership*), dimana petani mempunyai kebebasan untuk memilih dan memutuskan.

3. Penyuluh pertanian merupakan proses yang terus menerus

Indonesia yang sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dengan mata pencaharian bergerak di bidang pertanian, selalu diupayakan untuk meningkatkan produktivitas usahatani agar pendapatan pertanian keluarganya meningkat. Peningkatan kesejahteraan petani tidak akan berhenti, dengan sendirinya upaya peningkatan produktivitas usahatani harus terus menerus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pertanyaan yang muncul, dapatkah produktivitas usahatani ditingkatkan kalau kualitas sumberdaya manusia pertanian tidak ditingkatkan?

Teknologi usahatani selalu mengalami perubahan untuk meningkatkan produktivitas, dengan demikian akan menuntut perubahan perilaku para petani sebagai sasaran penyuluhan pertanian yang secara terus menerus harus mengikuti perkembangan teknologi. Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem, sehingga diperlukan upaya perubahan perilaku petani sebagai salah satu sistem untuk terus belajar agar meningkatkan kemampuannya, penyuluhan pertanian merupakan proses yang berkesinambungan, namun kita maklumi bahwa penyuluhan pertanian dalam penyelenggaraannya tidaklah berdiri sendiri dan diperlukan kerjasama dengan pihak terkait, karena memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga diperoleh hasil yang efektif.

Margono Slamet (1989), menekankan perlunya falsafah penyuluhan yang harus berakar pada falsafah Negara Pancasila, terutama yang berkaitan dengan sila-sila; *Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, artinya jika petani (sebagai sasaran utama penyuluhan pertanian) diminta untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan produksinya. Seluruh Bangsa Indonesia juga harus mau mengangkat harkat kaum taninya demi kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada kepercayaan kepada Yang Maha Esa, menghargai prinsip demokrasi, serta demi tercapainya persatuan bangsa Indonesia.

Dalam pengertian di atas, perlu dipahami bahwa petani bukanlah orang bodoh dan karena itu tidaklah pantas untuk tetap dibiarkan atau bahkan dibuat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Petani haruslah dilihat sebagai manusia biasa yang memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya dan memiliki keinginan dan harapan untuk terlepas dari kemiskinan dan

penderitaan yang mereka kehendaki. Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan pertanian harus mampu tidak saja mengembangkan potensi petani tetapi juga harus mau memberikan peluang kepada kekuatannya sendiri untuk mengembangkan potensinya supaya terlepas dari kemiskinan dan kebodohan.

Dengan demikian, penyuluhan pertanian harus didukung oleh kegiatan lain yang dapat menjadikan petani sebagai petani-petani tangguh. Petani tangguh bukanlah petani yang dengan penuh kesabaran sanggup tahan hidup dalam kebodohan dan penderitaan, tetapi petani yang terus menerus mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dengan kreatif berswakarsa dan berswadaya dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan demi perbaikan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya.

Sehubungan dengan falsafah penyuluhan pertanian yang berlandaskan pada falsafah Pancasila. Loekman Soetrisno (1989) minta agar juga mengkaitkan dengan motto bangsa yang: *Bhineka Tunggal Ika* yang membawa konsekuensi pada; (1) perubahan administrasi penyuluhan dari yang bersifat *regulatif sentralistis* menjadi *fasilitatif partisipatif*, dan (2) pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang sering kali juga mewarnai *local agricultural practices*. Falsafah penyuluhan seperti itu, mengandung pengertian bahwa:

- (1) Administrasi penyuluhan tidak selalu dibatasi oleh peraturan-peraturan dari "pusat" yang kaku, karena hal ini seringkali petani tidak memperoleh keleluasaan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikian juga halnya dengan administrasi yang terlalu "sentralistis" sering kali tidak mampu secara cepat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah-daerah, karena masih menunggu "petunjuk/restu" dari pusat. Padahal dalam setiap permasalahan yang dihadapi, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani seringkali berdasarkan pertimbangan bagaimana untuk dapat "*menyelamatkan keluarganya*". Dalam kasus-kasus seperti itu, seharusnya penyuluh diberi kewenangan untuk secepatnya pula mengambil inisiatifnya sendiri. Dilain pihak, administrasi yang terlalu "regulatif" seringkali sangat membatasi kemerdekaan petani untuk mengambil keputusan untuk usaha taninya.
- (2) Penyuluh, selain memberikan "ilmu"nya kepada petani, ia harus mau belajar tentang kemampuan yang dimiliki petani yang sering kali dianggap tidak rasional (karena yang oleh penyuluh dianggap rasional adalah yang

sudah menjadi petunjuk pusat). Padahal, praktek-praktek usahatani yang berkembang dari budaya lokal sering juga sangat rasional karena telah mengalami proses *trial, and error* dan teruji oleh waktu.

Berkaitan dengan pendapat dari beberapa ahli tersebut di atas, maka Ensminger (1962) menyatakan bahwa falsafah penyuluhan dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat (khususnya para petani); (2) Sasaran penyuluhan adalah segenap warga masyarakat (pria, wanita, termasuk anak-anak) untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya; (3) Penyuluhan juga mengajar masyarakat tentang apa yang diinginkan, dan bagaimana cara mencapai keinginan-keinginan itu; (4) Penyuluhan bertujuan untuk membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri; (5) Penyuluhan adalah "belajar sambil bekerja" dan "percaya tentang apa yang dilihatnya"; (6) Penyuluhan adalah pengembangan individu, kepemimpinan, dan pengembangan dunianya secara keseluruhan; (7) Penyuluhan adalah suatu bentuk kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat; (8) Penyuluhan adalah pekerjaan yang diselaraskan dengan budaya masyarakatnya; (9) Penyuluhan adalah hidup saling berhubungan, saling menghormati dan saling mempercayai antara satu kepada yang lainnya; (10) Penyuluhan merupakan kegiatan dua arah; dan (11) Penyuluhan merupakan proses pendidikan yang demokrasi dan berkelanjutan.

2.2. Prinsip-Prinsip Penyuluhan

Falsafah merupakan landasan dalam berfikir dan bertindak yang masih bersifat umum dan abstrak atau belum merupakan konsep operasional, *maka prinsip sudah merupakan pedoman atau pegangan kerja dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian* (Soekandar, 1973).

Mathews (1973) menyatakan bahwa: *Prinsip adalah suatu pertanyaan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten*. Karena itu prinsip berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai hasil pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian, "prinsip" dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menurut Soekandar (1973) prinsip penyuluhan pertanian banyak sekali jumlahnya, namun beberapa hal yang penting mengenai prinsip penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan pertanian seyogyanya diselenggarakan menurut keadaan yang nyata,
- b. Penyuluhan pertanian seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran
- c. Penyuluhan pertanian ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tani
- d. Penyuluhan pertanian adalah pendidikan untuk demokrasi
- e. Harus ada kerjasama yang erat antara penyuluh, peneliti dan lembaga lain yang terkait
- f. Rencana kerja penyuluhan pertanian sebaiknya disusun secara bersama antara petani dan penyuluh
- g. Penyuluhan pertanian bersifat luwes dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan

Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka penyuluhan memiliki prinsip-prinsip:

- a. *Mengerjakan*, artinya, kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu, karena dengan "mengerjakan" mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. *Akibat*, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, sebab perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/penyuluhan di masa-masa mendatang.
- c. *Asosiasi*, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang ingat penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/ subur akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan.

Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yang mencakup:

1. *Minat dan Kebutuhan*, artinya penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam, apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya. Kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.
2. *Organisasi Masyarakat Bawah*, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/ menyentuh organisasi masyarakat bawah.
3. *Keragaman Budaya*, artinya penyuluh harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Dilain pihak, perencanaan penyuluhan yang seragam untuk setiap wilayah sering kali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.
4. *Perubahan Budaya*, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dan lain-lain.
5. *Kerjasama dan Partisipasi*, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.
6. *Demokrasi dalam Penerapan Ilmu*, artinya dalam penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan pada masyarakatnya untuk memilih alternatif yang ingin diterapkan, serta penggunaan metoda Penyuluhan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat sasaran.
7. *Belajar Sambil Bekerja*, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat "belajar sambil bekerja" atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Dengan kata lain, penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-

konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau melihat pelaksanaan kegiatan secara nyata.

8. *Penggunaan metode yang sesuai*, artinya penyuluh harus melakukan penerapan metode yang sesuai dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) sasarannya. Dengan kata lain, tidak ada satupun metoda yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran secara efektif dan efisien.
9. *Kepemimpinan*, artinya penyuluh tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/ kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin – pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan penyuluhannya.
10. *Spesialis yang telah terlatih*, artinya penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
11. *Segenap keluarga*, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian bahwa:
 - a. Penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga.
 - b. Setiap anggota keluarga memiliki peran/ pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan.
 - c. Penyuluhan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama.
 - d. Penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga.
 - e. Penyuluhan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usahatani.
 - f. Penyuluhan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda.
 - g. Penyuluhan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga.
 - h. Memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi maupun budaya.
 - i. Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya.

12. *Kepuasan*, artinya penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya.

2.3. Kelembagaan Penyuluhan dan Peranannya

Kelembagaan penyuluhan yang dimaksud seperti tertuang dalam Undang

- Undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan pasal 8, yaitu:
- Kelembagaan penyuluhan pemerintah dibantu Komisi Penyuluhan Pertanian Pusat
- Kelembagaan penyuluhan swasta dibantu Komisi Penyuluhan Pertanian Daerah
- Kelembagaan penyuluhan swadaya dibantu Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten
- Dibentuk Tim Penyuluhan Lapangan (Field Extension Team/ FET)
- Di Desa dibentuk Pos Penyuluhan Desa

Lebih lanjut dijelaskan, kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri dari tingkat pusat hingga desa yang intinya adalah :

- Pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan
- Pada tingkat provinsi berbentuk badan koordinasi penyuluhan
- Pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan
- Pada tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan.

Dalam undang – undang ini, swasta juga diberi kesempatan ambil bagian dalam penyuluhan dan dapat terbentuk pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan setempat.

Kelembagaan swadaya juga dapat berperan dalam penyuluhan dan ini dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama (petani) dan pelaku usaha.

Sedangkan kelembagaan pada tingkat desa menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 ini berbentuk kelompok penyuluhan desa/ kelurahan yang bersifat non-struktural. Kelembagaan penyuluhan pertanian saat ini yang ada di Indonesia beragam bentuknya, kelembagaan yang ada ini akan disempurnakan lagi sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2006. Hal yang perlu ditekankan,

sepanjang lembaga yang ada tidak bertentangan dengan UU No. 16 lembaga tersebut perlu dipertahankan.

Secara umum peran dari kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia tertuang pada pasal 9 yang intinya sebagai berikut:

1. Kelembagaan pada tingkat pusat/ nasional, yaitu:

- Menyusun kebijakan yang bersifat umum , menyusun prosedur nasional, landasan dan akreditasi penyuluh, sarana dan prasarana serta pembahasannya.
- Menyelenggarakan pengembangan penyuluh, pengelompokan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan.
- Melaksanakan koordinasi penyuluhan, pengelolaan, pemanfaatan, evaluasi baik alokasi dan deslokasi sumberdaya penyuluh.
- Melaksanakan kerjasama penyuluhan nasional, regional dan internasional, dan
- Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swakarsa.

Badan pengelola tingkat pusat ini bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian selain itu ada arah koordinasi tingkat pusat yang konkrit non struktural, yang diakui keputusan presiden, yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan Pusat. Pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat badan koordinasi pelaksana. Pengelola provinsi yang ditunjuk gubernur, untuk itu dibentuk sekretariat dipimpin pejabat setingkat eselon II A, yang diakui oleh peraturan gubernur. Badan ini disebut lembaga pengelola provinsi yang antara lain menegaskan kebijakan sebagai salah satu masukan bagi gubernur.

2. Badan pelaksana penyuluhan di tingkat kabupaten/ kota, dipimpin pejabat setingkat eselon II dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan berarti semua tanggungjawab diserahkan kepada Bupati/ Walikota.

3. Pada tingkat kecamatan, lembaga penyuluhan yang penting adalah Balai Penyuluhan yang mempunyai tugas :

- Menyusun program penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan
- Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program
- Menyampaikan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, dan informasi pasar

- Memfasilitasi perkembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama, seperti kelompok tani
- Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi petani (pelaku utama).

Balai penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh, pelaku usaha dan bertanggungjawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.

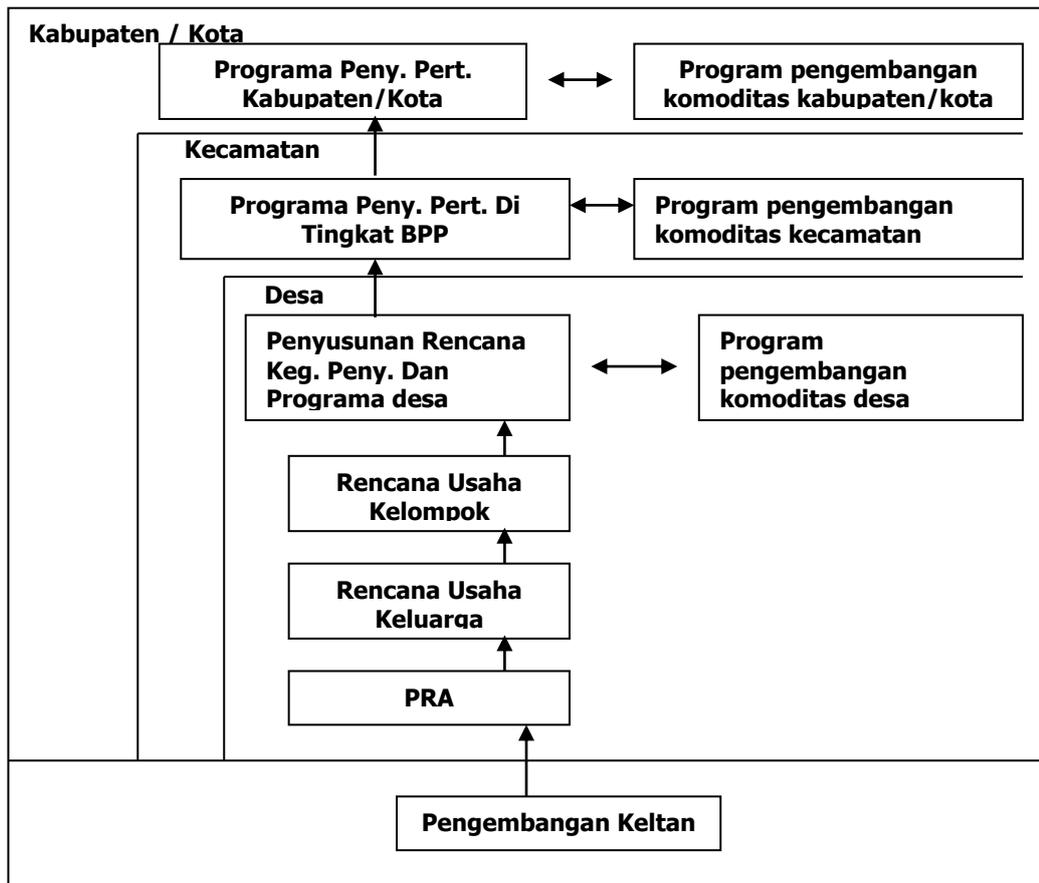
4. Pos penyuluhan desa/ kelurahan

Lembaga ini merupakan unit kerja non-struktural, dibentuk dan dikelola oleh petani secara partisipatif dan berfungsi tempat pertemuan penyuluh, petani dan pelaku usaha. Pos penyuluhan ini mempunyai beberapa peran diantaranya adalah menyusun program penyuluhan desa, melaksanakan penyuluhan dan sebagainya (lihat UU No. 16 tahun 2006).

2.4 Tata Hubungan Kerja Penyuluhan

Penyuluhan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal bagi petani dan keluarganya, ternyata melibatkan penyuluh pertanian. Kewenangan operasional di lapangan menjadi tanggungjawab dan wewenang pemda masing-masing.

Dilihat dari aspek perencanaan penyuluhan, hubungan kerja pengelolaan penyuluhan pertanian di suatu wilayah kabupaten nampak jelas pada bagan di bawah ini. Dalam bagan 1 terlihat hubungan antara rencana kerja penyuluhan (programa) pada tingkat kabupaten, kecamatan dengan desa pada pengembangan komoditas di wilayah tersebut. Ini penting agar komoditas spesifik lokasi (andalan) dapat direncanakan secara tepat pada pengembangannya (Anonimus, 2005). Dari uraian di atas nampak bahwa penyuluhan pertanian pada berbagai tingkat berbeda – beda.



Gambar 1. Alur Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
(Anonimus, 2005)

1. Penyuluhan di Tingkat Desa

Diawali dengan mengkaji desa secara partisipatif (PRA), maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah:

- Mengelola kegiatan penyuluhan pelaku utama sejak perencanaan hingga evaluasi, dilakukan dari, oleh, dan untuk petani
- Mengelola dana yang dikumpulkan dari anggota kelompok (swadana)
- Menindaklanjuti PRA dengan menyusun Rencana Usaha Keluarga (RUK), Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Kegiatan Desa (RKD), dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD) secara sistematis berlangsung pada tingkat desa. Penyuluhan swakarsa yang ada di suatu daerah merupakan bagian proses belajar-mengajar dibantu PPL/PNS setempat. Tugas ini disesuaikan dengan RKPD yang disusun.

2. Penyuluhan di Tingkat Kecamatan

Pada tingkat kecamatan, pelaku, dan tugas penyuluh dimotori oleh PPL/PNS, diikuti pegawai lainnya sesuai UU No. 16 tahun 2006. Setiap penyuluh memiliki wilayah kerja (WKK) 1 – 2 desa.

Tugas langsung yang diselenggarakan untuk suatu kecamatan/Balai Penyuluhan adalah:

- Menyusun program penyuluhan pertanian BPP sesuai dengan program desa
- Membantu petani/penyuluh swakarsa dari desa
- Menyusun pedoman dan format belajar
- Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kepada petani tentang teknologi, pemasaran hasil, dan lain – lain.
- Merencanakan jaringan hasil desa
- Merencanakan pertemuan dengan anggota kelompok tani, kelompok usaha, kebijakan dan teknologi.
- Memberikan pelayanan bantuan kepada desa.

Semua tugas itu dilaksanakan oleh tim PPL yang bertugas di wilayah tersebut dan bertanggungjawab kepada kepala BPP.

3. Penyuluhan di Tingkat Kabupaten

Sejak era otonomi daerah, peran kabupaten menjadi titik sentral. Banyak lembaga terbentuk seperti KIPP, BIPP atau lembaga lain di kabupaten/ kota sesuai kebijakan daerah. Secara singkat tugas penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/ kodya adalah:

- Merumuskan kebijakan penyuluhan dan pedoman penyelenggaraan penyuluhan.
- Mengelola pendanaan, sarana dan personalia yang bertugas di wilayah kerja.
- Menyusun rencana penyelenggaraan penyuluhan.
- Menyelenggarakan kampanye seperti program dan sebagainya.
- Memberi dukungan tugas tim penyuluhan
- Melakukan kaji tindak pengembangan daerah
- Mengumpulkan data dan informasi pasar untuk disebarluaskan kepada petani.

Dalam mewujudkan hal-hal tersebut dinas penyuluh seharusnya bekerjasama dengan lembaga penyuluhan kabupaten yang dibentuk oleh bupati.

4. Penyelenggaraan Penyuluhan di Tingkat Provinsi

Kelembagaan penyuluhan ditingkat provinsi adalah Badan koordinasi penyuluhan yang ditetapkan oleh keputusan gubernur.

Pada umumnya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut berkaitan dengan kebijaksanaan umum seperti:

- a. Pengorganisasian sumberdaya tersedia di masing-masing provinsi,
- b. Pemanfaatan sumberdaya secara optimal
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten/ kodya.

5. Penyelenggaraan Penyuluhan di Tingkat Nasional/Pusat

Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penyuluhan secara umum, yakni dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian. Tugas wewenang adalah, antara lain:

- a. Menyusun perencanaan nasional penyuluhan
- b. Merumuskan standarisasi dan akreditasi penyuluh pertanian
- c. Menetapkan pola kerja penyuluh
- d. Menyusun pola diklat penyuluh.

2.5. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU)

Pendekatan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, yaitu petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut diupayakan antara lain melalui penyuluhan pertanian. Salah satu pendekatan dalam penyuluhan pertanian adalah dengan menggunakan Sistem Kerja "Latihan dan Kunjungan" (LAKU). Sistem Kerja LAKU yaitu pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/ kelompok tani (poktan) yang dilakukan secara terjadwal. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Sistem tersebut sangat efektif dalam

meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani, sehingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras.

Beberapa aspek positif Sistem Kerja LAKU diantaranya yaitu 1) Penyuluh pertanian memiliki rencana kerja dalam setahun; 2) Penyuluh pertanian mengunjungi petani secara teratur, dan berkelanjutan; 3) Penyuluh pertanian cepat mengetahui masalah yang ada di petani dan cepat memecahkannya; 4) Penyuluh pertanian secara teratur mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilannya; 5) Penyuluhan dilaksanakan melalui pendekatan kelompok; serta 6) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian mendapatkan supervisi dan pengawasan secara teratur.

Penerapan sistem kerja LAKU diharapkan dapat meningkatkan motivasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendamping dan pembimbing petani, serta menjamin kesinambungan pembinaan penyuluh kepada petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatannya.

Adapun tujuan dari Sistem Kerja LAKU ini antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan kepada petani
- b. Meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas dan pendapatannya
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan melalui sistem kerja yang terukur dan terjadwal.

Penyuluhan pertanian dengan penggunaan Sistem Kerja LAKU didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Keakraban, artinya terjalinnya hubungan yang akrab antara penyuluh pertanian dengan petani/ poktan
- b. Keterpaduan, artinya keterpaduan antara pelaksanaan pelatihan penyuluh dengan kunjungan kepada petani/ poktan
- c. Faktual, artinya materi yang disampaikan merupakan kebutuhan petani/ poktan dalam pengembangan usahatannya
- d. Berkesinambungan, artinya pelaksanaan pelatihan penyuluh dan kunjungan kepada petani/ poktan dilakukan secara terjadwal sesuai dengan rencana kerja penyuluh dan perencanaan poktan.

Berikut ini juga kami sampaikan beberapa pengertian yang perlu kita pahami:

1. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada penyuluh pertanian melalui metode partisipatif untuk meningkatkan kemampuan mendampingi dan membimbing poktan.
2. Kunjungan adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan penyuluh pertanian kepada poktan.
3. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani/poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.
4. Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
6. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, saranaproduksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.
8. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana

produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Adapun tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) antara lain:

1. Persiapan

- Melakukan review Programa Penyuluhan Desa dan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dari masing-masing poktan melalui Rembug Tani Desa
- Melakukan inventarisasi masalah dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh poktan dalam pengembangan usahatani
- Menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan petani/ poktan
- Menyusun materi dan metode yang dibutuhkan petani/poktan sebagai materi kunjungan
- Menyesuaikan antara Rencana Kegiatan Penyuluh Tahunan (RKT) dengan jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan oleh petani/ poktan
- Koordinator penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melaksanakan pertemuan penyuluh untuk membahas identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi poktan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)
- Melakukan penilaian kesenjangan kemampuan (*discrepancy*) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani/ poktan dalam pengembangan usahatannya
- Menetapkan jadwal dan materi latihan bagi penyuluh
- Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mengirimkan jadwal dan materi penyuluhan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan/ kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/ kota untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan latihan yang diperlukan oleh penyuluh di BP3K
- Menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan kepada petani/ poktan.

2. Pelaksanaan

Dalam Sistem Kerja LAKU, latihan bagi penyuluh pertanian diselenggarakan secara berkala/ rutin, terjadwal sekali dalam dua minggu dan

berkesinambungan. Tempat latihan di BP3K atau di tempat lain yang disepakati oleh penyuluh pertanian. Proses latihan (belajar – mengajar) difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang menguasai materi, maupun narasumber dari instansi/ lembaga terkait lainnya, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi, dan lainnya.

a. Mekanisme Sistem Kerja LAKU

Setiap penyuluh pertanian di WKPP dapat membina 8–16 poktan dan dijadwalkan mengunjungi setiap kelompok minimal sekali dalam dua minggu dengan jadwal sebagai berikut:

Minggu I

Penyuluh pertanian di WKPP melakukan kunjungan kepada empat poktan selama empat hari kerja pada minggu I. Kunjungan penyuluh dapat dilakukan ke tempat pertemuan poktan, lapangan dalam rangka pendampingan demonstrasi maupun ke usahatani anggota poktan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha.

Hari ke-5, penyuluh pertanian melakukan pertemuan di BP3K untuk mereview hasil kunjungan ke petani/ poktan yang disupervisi oleh Kepala BP3K/ supervisor/ coordinator penyuluh tingkat kecamatan.

Minggu II

Penyuluh pertanian di WKPP melanjutkan melakukan kunjungan kepada minimal empat poktan selama empat hari pada minggu II. Hari ke-5, penyuluh di BP3K mendapatkan pelatihan dari narasumber dari instansi/ lembaga terkait lainnya, seperti BPTP, dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi, atau pihak lain yang terkait dengan materi yang dibutuhkan oleh penyuluh.

Pada pelaksanaan pelatihan juga dilakukan supervisi teknis oleh penyuluh senior dan pejabat dari Badan Pelaksana Penyuluhan/ kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/ kota.

Setiap kunjungan penyuluh ke poktan agar dapat memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi pada kegiatan pertemuan penyuluh di BPK/ BP3K. Perumusan jadwal latihan dan kunjungan dilakukan secara

partisipatif pada pertemuan koordinasi di BPK/ BP3K yang dihadiri oleh semua penyuluh dan wakil dari poktan dan gapoktan.

Jadwal kunjungan penyuluh ke poktan dapat disesuaikan dengan kesepakatan pada rembug tani. Apabila jumlah poktan yang ada di WKPP lebih dari 8 poktan, maka penyuluh dapat melakukan kunjungan lebih dari satu poktan per-harinya. Apabila ada poktan yang ada di WKPP menjadi pelaksanaan

kegiatan program tertentu, maka penyuluh dapat menambahkan intensitas waktu kunjungan ke poktan tersebut.

b. Ruang Lingkup Materi dan Metoda

- Materi

Materi latihan penyuluh di BPK/ BP3K dilakukan oleh penyuluh senior, peneliti, praktisi maupun petugas dari dinas/ instansi yang terkait dengan topik yang telah ditetapkan.

Penyuluh senior di BPK/ BP3K dapat ditugaskan menjadi penanggungjawab program penyuluhan yang merencanakan pola, materi dan pelaksanaan latihan penyuluh sesuai dengan program penyuluhan dan hasil identifikasi kebutuhan latihan para penyuluh di wilayah yang bersangkutan.

Materi latihan disesuaikan dengan hasil analisa kesenjangan kemampuan (*discrepancy*) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi poktan dan gapoktan serta materi lain yang menyangkut pembangunan pertanian, yaitu:

- Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah
- Pengembangan dan penguatan poktan dan gapoktan
- Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.

Materi pelatihan dilengkapi dengan bahan ajar dan jadwal pelaksanaan pelatihan.

Materi kunjungan penyuluh ke poktan harus tercantum dalam rencana kerja penyuluh, untuk itu dalam setiap kunjungan penyuluh harus mencatat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya pada buku kerja penyuluh yang telah dibagikan, yang mencakup:

1. Kegiatan yang dilakukan
2. Masalah yang dihadapi petani
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh poktan maupun penyuluh.

Ruang lingkup materi yang disampaikan pada kunjungan penyuluh ke poktan diantaranya:

1. Teknologi tepat guna yang membantu poktan dan gapoktan dalam memecahkan permasalahan usahatani
2. Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah
3. Pengembangan dan penguatan poktan dan gapoktan
4. Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.

- Metode

Metode latihan dilakukan dengan pendekatan andragogy, pemecahan masalah dan dapat dikombinasikan pengamatan langsung dengan memanfaatkan lahan percontohan di BP3K sebagai sarana pembelajaran.

Adapun metoda kunjungan kepada poktan dan gapoktan dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan bersama antara penyuluh dengan poktan dan gapoktan melalui metode anjarsana, pertemuan, diskusi petani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usahatani. Kegiatan kunjungan dapat merupakan bagian dari pelaksanaan kursus, demonstrasi (cara dan hasil) dan sekolah lapangan.

Supervisi dilakukan oleh Kepala BP3K bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh di WKPP sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan sebagai pengendalian agar kunjungan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan serta berjalan dengan efektif dan efisien.

Materi supervisi diperoleh dari laporan yang tercantum dalam buku kerja penyuluh, laporan poktan/ gapoktan atau informasi lainnya yang membutuhkan adanya supervisi dari kepala BPK/ BP3K.

Hasil supervisi disusun sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan dalam dua minggu yang akan datang serta sebagai bahan

penyusunan laporan kemajuan kegiatan penyuluhan. Hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala BPK/ BP3K secara terjadwal dilaporkan kepada Bapeluh sebagai bahan perencanaan fasilitasi yang akan dilakukan oleh penyuluh di kabupaten mapun sebagai bahan untuk disampaikan kepada pihak lain yang dapat memberikan dukungan untuk menjadi narasumber pada pertemuan latihan di BPK/ BP3K.

III. PROSEDUR

3.1. Pendekatan

Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 ini dimulai Januari melibatkan beberapa instansi yang Pendekatan dalam kegiatan ini dilakukan secara teknis dan non teknis.

3.2. Ruang Lingkup

3.2.1. Tempat dan Waktu

Koordinasi penyuluhan pertanian ini telah dilaksanakan pada beberapa Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, serta pada dinas/ instansi terkait baik di daerah maupun pusat, pada bulan Januari sampai Desember 2016.

3.2.2. Materi

Bentuk pelaksanaan kegiatannya yaitu:

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dinas/ instansi terkait di tingkat pusat dan daerah
- Pertemuan koordinasi dan pembinaan penyuluhan pertanian di BP3K
- Pertemuan dalam rangka perencanaan dan penyusunan program penyuluhan di tingkat BP3K/ kecamatan.

3.2.3. Bentuk Dukungan

Dukungan instansi BPTP Kalimantan Timur terhadap kegiatan ini adalah:

- Bahan informasi dalam bentuk leaflet, liptan, folder dan brosur
- Informasi teknologi hasil pengkajian BPTP

3.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

3.3.1. Bahan dan Alat

Bahan yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan teknis sedangkan alat yang diperlukan berupa alat tulis menulis dan komputer supplier.

3.3.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

- Pertemuan

Dilakukan pertemuan antara penyuluh yang ada di BP3K dengan Penyuluh Pertanian Spesial (PPS) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur.

- Ceramah

Berupa penyampaian materi dari Penyuluh Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur.

- Diskusi

Dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara narasumber dengan para peserta (penyuluh pertanian lapangan) yang ada di BP3K Kabupaten/Kota, mengenai materi yang dibicarakan.

3.3.3. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Pembentukan tim dan pembuatan jadwal

Pembentukan tim pelaksana kegiatan dimaksudkan agar penyelenggaraan koordinasi dan pemberdayaan penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan secara terorganisir. Selanjutnya tim pelaksana menyusun rencana kegiatan tahun 2016. Penyusunan rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk matrik kegiatan yang memuat materi/bahan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

- Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota dan UPT

Rencana kegiatan yang telah disusun selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau instansi terkait lainnya, dengan maksud sinkronisasi dan kelancaran rencana kegiatan tersebut.

b. Pelaksanaan Koordinasi dan pemberdayaan penyuluhan pertanian

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana dan jadwal yang telah disusun dalam bentuk matrik kegiatan.

c. Pelaporan

Pelaporan yang dibuat mengenai pelaksanaan kegiatan yaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun berjalan.

3.3.4. Pelaksanaan Koordinasi dan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada BP3K Kabupaten/ Kota yang sebelumnya telah ditentukan. Penyuluh Pertanian Spesial (PPS) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kaltim bertindak sebagai narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan berupa:

- Koordinasi dan forum pertemuan
- Pembinaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di daerah dilakukan dengan dinas/ instansi terkait, diantaranya dinas pertanian kab/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di kabupaten dan kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Berikut beberapa perjalanan terkait koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan pertanian BPTP Kalimantan Timur.

a. Koordinasi dan Sinkronisasi di Kabupaten Kutai Timur

Perjalanan koordinasi pertama yang dilakukan di awal tahun anggaran 2017 adalah perjalanan ke Kabupaten Kutai Timur. Perjalanan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka mengidentifikasi potensi, kebutuhan teknologi dan permasalahan di sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Secara teknis kegiatan koordinasi penyuluhan kali ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada stakeholder sektor pertanian (Tim Kerja Dinas Pertanian, PPL/THL serta petani) yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

BPTP Balitbangtan Kaltim sebagai salah satu institusi pemerintah dalam hal ini berperan untuk mendesiminasikan teknologi tepat guna untuk mendukung kesuksesan tujuan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Kutai Timur yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat di sektor ekonomi. Untuk itu melalui penyebaran kuesioner, diharapkan akan didapat informasi yang spesifik lokasi terkait kebutuhan masyarakat akan luaran dari kegiatan desiminasi yang akan dilaksanakan oleh BPTP.



Foto Bersama Usai Kegiatan Temu Koordinasi Di Kabupaten Kutai Timur

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dalam rangka pencapaian program kegiatan yang diusung Kementerian Pertanian melalui BPTP Balitbangtan Kaltim. Tujuan akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya informasi yang tepat sehingga upaya pemberdayaan petani untuk mampu menjadi pelaku utama yang handal dalam menerapkan produksi dan produktivitas komoditas prioritas bisa tercapai.



Suasana Temu Koordinasi Di Kabupaten Kutai Timur

b. Koordinasi dan Sinkronisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Perjalanan koordinasi penyuluhan pada Mei 2017 merupakan bagian dari rangkaian awal kegiatan temu koordinasi global yang akan diadakan BPTP Kaltim. Untuk itu kegiatan ini selain bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus mengantarkan surat undangan kepada SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait kegiatan Temu Koordinasi Penyuluhan yang akan dilaksanakan oleh BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur pada tanggal 17 Mei 2017.



Dengan adanya proses koordinasi sekaligus mengantarkan surat undangan diharapkan kegiatan Temu Koordinasi Penyuluhan yang dilakukan oleh BPTP Kalimantan Timur mendapatkan apresiasi dari stakeholder pertanian. Karena Kegiatan Temu Koordinasi Penyuluhan Pertanian yang diadakan kali ini mengambil tajuk "Peran Penyuluh Untuk Mendukung Swasembada Pangan".

Rangkaian perjalanan temukoordinasi penyuluhan di Kabupaten Kutai Timur juga dilanjutkan pada 19 Mei 2017. Kegiatan kali ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka mengidentifikasi potensi, kebutuhan teknologi dan permasalahan di sektor pertanian yang ada di Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara teknis kegiatan koordinasi penyuluhan kali ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada stakeholder sektor pertanian (Tim Kerja Dinas Pertanian, PPL/THL serta petani) yang ada di Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

BPTP Balitbangtan Kaltim sebagai salah satu institusi pemerintah dalam hal ini berperan untuk mendesiminasikan teknologi tepat guna untuk mendukung kesuksesan tujuan kegiatan festival kampung tani yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat di sektor ekonomi.

Untuk itu melalui penyebaran kuesioner, diharapkan akan didapat informasi yang spesifik lokasi terkait kebutuhan masyarakat akan luaran dari kegiatan desiminasi yang akan dilaksanakan oleh BPTP.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dalam rangka pencapaian program kegiatan yang diusung Kementerian Pertanian melalui BPTP Balotbangtan Kaltim. Tujuan akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya informasi yang tepat sehingga upaya pemberdayaan petani untuk mampu menjadi pelaku utama yang handal dalam menerapkan produksi dan produktivitas komoditas prioritas bisa tercapai.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten yang sering mendapatkan kunjungan dari Tim Penyuluh BPTP Kalimantan Timur. Hal itu dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup luas didukung dengan jangkauan wilayah yang tidak terlalu jauh membuat wilayah ini menjadi cukup mendapat perhatian lebih.

Ditengah semakin banyak dan kompleksitasnya permasalahan pertanian, penyuluh sebagai ujung tombaknya pemerintah dalam bidang pengembangan program pertanian, diharapkan semakin optimal dalam melaksanakan tugas-

tugas yang diembannya. Untuk itu perlu diagendakan secara teratur pertemuan koordinasi penyuluhan.

Perjalanan yang dilakukan pada September 2016 ke Kabupaten Kutai kartanegara bertujuan untuk melakukan koordinasi ke instansi pemerintahan yang terkait dengan penyuluhan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Koordinasi Penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPTP Kalimantan Timur.

BPTP Kalimantan Timur, sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Pertanian selalu mejalin koordinasi dengan istansi pemerintahan daerah, agar program kerja yang dilaksanakan bisa sinergi dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat petani.



Suasana Temu Koordinasi Di Kabupaten Kutai Timur

Untuk itu disamping sebagai ajang silaturahmi, korrдинasi penyuluhan juga sebagai Pembinaan BPP/BPK (Balai Penyuluhan Pertanian). Dengan adanya kegiatan koordinasi penyuluhan diharapkan para penyuluh pertanian di daerah dapat menerima berbagai hal informasi, antara lain informasi teknologi pertanian, yang nantinya dapat mendiseminasikannya ke petani, dan berbagai informasi lainnya terkait pengembangan kedepan kinerja para penyuluh, agar kiranya para penyuluh dapat bekerja lebih baik lagi, lebih selaras dan lebih bersinergi antar lintas unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, mau pun juga lintas instansi antara SKPD Pemerintah Daerah.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi di Provinsi Kalimantan Timur

Perubahan sistem kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia yang sangat dinamis menuntut adanya berbagai perubahan lain dalam kegiatan penyuluhan di lapangan agar didapat format yang tepat, sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga kegiatan penyuluhan menjadi lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan petani. Era penyuluhan dianggap paling dinamis adalah pasca era BIMAS (Bimbingan Masyarakat) dimana pada era ini penyuluh pertanian tersebar pada dinas instansi antara lain dinas peternakan, Dinas Perkebunan , Dinas Kehutanan dan cabang dinas pertanian. Penyuluh didistribusikan ke masing masing dinas sehingga muncul penyuluh peternakan, penyuluh perkebunan, penyuluh kehutanan dan penyuluh pertanian tanaman pangan.

Setiap dinas instansi lingkup sektor pertanian kala itu punya tenaga penyuluh lapangan guna membantu pelaksanaan program, meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani, dan mensukseskan visi dan misi dari dinas dimana penyuluh bertugas. Permasalahanpun muncul ketika kondisi dilapangan mulai bertentangan dimana dinas instansinya bersifat subsektor maka penyuluh bersifat monovalen sementara petani yang dibina merupakan petani yang mempunyai multi usaha. Hingga muncul dasar hukum (UU No.16 tahun 2006) yang mengisyaratkan Penyuluh pertanian lapangan bersifat polyvalensi karena bagaimanapun juga seorang petani mempunyai banyak usaha baik bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, juga perikanan.

Titik kedinamisan kelembagaan penyuluhan di Indonesia tidak hanya berhenti pada UU No.16 Tahun 2006, bermunculan landasan hukum yang membuat kelembagaan penyuluh sebagai pion di sektor pertanian menjadi sedikit berubah peranannya. Permasalahan yang pada akhirnya muncul di lapangan adalah lemah dan tidak seragamnya kelembagaan penyuluhan, terutama di level kabupaten/kota. Sebagian wilayah telah membentuk Bapeluh sendiri atau menggabungkan dengan BKP, namun masih banyak yang menempatkan penyuluh terpisah-pisah di bawah dinas teknis masing-masing. Akibatnya, efektivitas penyuluhan rendah, kurang terkoordinasi, dan jati diri penyuluhan kendor dan hal akan berpengaruh pada kesuksesan pembangunan di sektor pertanian.

Data statistik menyebutkan hingga tahun 2019 sektor pertanian masih akan dihadapkan pada berbagai kendala, diantaranya : jumlah penduduk yang terus meningkat, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, terbatasnya infrastruktur (jaringan irigasi, jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan), belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang tidak terkendali, ketergantungan konsumsi beras, kompetisi pemanfaatan air dan status kepemilikan lahan. Disamping sejumlah kendala tersebut, pertanian ke depan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain: (1) Masyarakat Ekonomi ASEAN; (2) otonomi daerah; (3) perubahan pola konsumsi; (4) dinamika kelembagaan penyuluhan; dan (5) dinamika pasar pangan.

Untuk itu dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada, pemerintah telah menetapkan program kegiatan dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Adapun untuk pencapaian program tersebut, maka penyuluh menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani pelaku utama untuk dapat menerapkan teknologi. Penyuluh merupakan salah satu faktor penggerak bagi para petani (pelaku utama) dan dapat berperan aktif sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator dalam rangka terlaksananya kegiatan pencapaian ketahanan pangan nasional.

Untuk meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian, perlu adanya sinergitas dan penyamaan persepsi terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan di berbagai tingkatan, maka Kementerian Pertanian melalui BPTP Balitbangtan, melakukan banyak kegiatan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan salah satu nya melalui kegiatan Temu Koordinasi Penyuluhan. Ini dilakukan untuk membangun persamaan persepsi dan meningkatkan sinergitas serta koordinasi antar instansi dan stakeholder lingkup pertanian.

Untuk itu dilaksanakan kegiatan temu koordinasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini dilakukan dalam bentuk diskusi publik. Beberapa poin penting yang menjadi bahasan dalam diskusi ini yaitu :

- a. Perlu melirik potensi lahan selain sawah. Lahan sub optimal seperti lahan rawa pasang surut, lahan kering dan lahan bekas tambang batubara

potensial untuk pengembangan pertanian dan inovasi teknologinya telah tersedia di Litbang pertanian.

- b. Katim diharapkan menjadi lumbung pangan nasional masa depan, karena untuk swasembada berkelanjutan tdk bisa hanya mengandalkan lahan sawah di Jawa yg sementara ini konversinya untuk non pertanian cukup besar, dan harapannya ada di luar Jawa terutama Katim dg potensi lahan untuk pertanian yg cukup besar.
- c. Mahasiswa Pertanian perlu sedini mungkin diperkenalkan dg pertanian di lapangan/ on farm. Jangan hanya saat PKL dan KKn saja.
- d. Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Tenggarong Seberang Kab Kukar satunya di Kaltim perlu sinergi dan didukung Faperta Unmul dan pengelola yg profesional. TTP diharapkan sbg inkubasi teknologi dan sbg BLK Plus. Perlu dukungan semua pihak terkait termasuk Fak Pertanian Univ Mulawarman untuk pengelolaan dan pengembangan. TTP tsb sbg salah satu model jg dalam pengelolaan lahan bekas tambang batubara unyuk pertanian.
- e. Banyak kegiatan di Litbang untuk penelitian, antara lain KP4S (kerjasama kemitraan penelitian dan pengkajian pertanian strategis) yg bisa dimanfaatkan oleh dosen dan sdh bisa mulai melibatkan mahasiswa dlm penelitian.
- f. Ke depan pertanian modern perlu didukung oleh alat dan mesin pertanian dan juga IT, seperti Kalender tanam terpadu dan Simotandi, Alsin dan IT tsb sbg upaya menarik generasi muda / mahasiswa dari kesan jika pertanian "kumuh".
- g. BPTP Kaltim siap bersinergi dg Univ Mulawarman untuk pengembangan Pertanian di Kaltim. Banyak mhs PKL, ada lab tanah terakreditasi, kebun percobaan, greenhouse dll.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi di Provinsi Kalimantan Utara

Tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan juga diadakan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu dikarenakan Kalimantan Utara juga masih merupakan wilayah kerja BPTP Kalimantan Timur. Untuk itu dalam rangka mendukung terwujudnya Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Utara serta untuk mencapai keterpaduan antara kebijakan dan program Badan Litbang Pertanian (BPTP Kaltim) dengan kebijaksanaan program pembangunan pertanian di Provinsi

Kalimantan Utara, maka akan Temu Koordinasi Penyuluhan, dengan tema "Peran Penyuluh Untuk Mendukung Swasembada Pangan".

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pembangunan pertanian terkini, mensinkronkan program, kegiatan dan desiminasi inovasi pertanian dalam mendukung swasembada pangan di Kaltara, serta menyusun strategi sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.

Acara ini menghadirkan pembicara dari berbagai instansi terkait penyuluh dan penyuluhan, yaitu : Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan & Hortikultura Kaltara dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim.



Suasana Temu Koordinasi Di Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan ini pada akhirnya memberikan suatu kesimpulan bahwa pada prinsipnya dalam kondisi apapun seorang penyuluh tetap harus banyak belajar dari lingkungan, khususnya dalam mendukung program strategis nasional untuk mewujudkan Single Vision Presiden RI (Nawa Cita). Penyuluh juga diminta memahami secara cepat dan dapat mengikuti cara kerja dan strategi baru dari pemerintahan saat ini khususnya Menteri Pertanian, yang harus bekerja cepat dan sering turun di lapangan.

Hal itu dikarenakan penyuluh memiliki peranan yang strategis dalam pelaksanaan UPSUS pencapaian swasembada pangan, dan dalam pengembangan kawasan pangan untuk delapan komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, daging sapi, cabai, dan bawang merah). Penyuluh harus dapat

mengidentifikasi komoditas strategis yang harus dikembangkan dan komoditas potensial lainnya di bidang hortikultura maupun perkebunan pada wilayah kerjanya.



Suasana Temu Koordinasi Di Provinsi Kalimantan Utara

Untuk itu kegiatan di lapangan perlu menghindari egosentrisme, menjalin sinergi, serta melakukan simplifikasi dan harmonisasi. Penyuluh juga harus bekerjasama dengan para peneliti dan struktural, sehingga tercipta harmonisasi kinerja yang baik.

Dan terkait dengan program khusus Pengembangan Kawasan Pangan Kepercayaan ini juga menjadi tantangan bagi penyuluh agar program ini sukses. Penyuluh juga harus menyukseskan program-program Tematik lainnya misalnya dalam pendampingan UPSUS. Maka perlu difasilitasi kerjasama dengan stakeholders (akademisi, Lembaga/Kementerian terkait, swasta, dan komunitas).

4.2. Desiminasi Hasil Teknologi Pertanian BPTP Kalimantan Timur

Penyebarluasan inovasi (teknologi) pada prinsipnya merupakan suatu transfer teknologi dari hasil-hasil penelitian kepada para pengguna. Hasil-hasil penelitian, percobaan dan penemuan lain yang disampaikan kepada petani (pengguna akhir) tentu tidak semudah yang diharapkan, banyak kendala atau halangan yang harus dilalui. Selanjutnya agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik, maka : (a) informasi, ide atau teknologi yang dikembangkan harus mudah diterapkan; (b) inovasi harus dicobakan (divalidasi) di setiap daerah; (c) penyebarluasan diarahkan dengan langkah terpadu dari keseluruhan system

produksi; (d) adanya penguatan (reinforcement) terhadap proses dan kondisi yang diperlukan agar mau menggunakan inovasi yang disampaikan; dan (e) fungsi pemerintah sebagai pelaksana dan pengatur dalam pengambilan keputusan administrative dalam pelaksanaan program penyuluhan.

Sampai saat ini telah banyak teknologi hasil penelitian dan pengkajian yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Teknologi tersebut juga telah tersebar pada unit kerja Balitbangtan, untuk selanjutnya disebarluarkan kepada masyarakat. BPTP Kalimantan Timur sebagai salah satu unit kerja di bawah Balitbangtan berperan dalam merakit teknologi pertanian spesifik lokasi menjadi lebih strategis. Dan sejalan dengan program Pemerintah Kalimantan Timur, kajian teknologi yang dihasilkan oleh BPTP Kalimantan Timur cenderung mengacu pada strategi dasar pembangunan pertanian Kalimantan Timur dengan komoditi andalannya. Penyebarluasan inovasi (teknologi) pada prinsipnya merupakan suatu transfer teknologi dari hasil-hasil penelitian kepada para pengguna. Untuk itu diseminasi teknologi pertanian diartikan sebagai upaya mengkomunikasikan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian/pengkajian teknologi spesifik lokasi kepada sasaran pengguna.

Untuk itu kegiatan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi perlu dilaksanakan dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian sebagai sosialisasi dan penyebaran informasi pertanian untuk mempercepat adopsi inovasi teknologi dan proses difusi di tingkat pengguna.

Diseminasi teknologi merupakan suatu proses penyebaran teknologi kepada pengguna, sehingga teknologi yang dihasilkan memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, diseminasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengkajian pertanian. Penelitian dan pengkajian menghasilkan teknologi baik berupa komponen, paket, formula data maupun informasi, serta alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Diseminasi teknologi pertanian diartikan sebagai upaya mengkomunikasikan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian/ pengkajian teknologi spesifik lokasi kepada sasaran pengguna.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh penyuluh dalam kegiatan transfer teknologi kepada petani. Salah satu bentuk penyebaran informasi dan teknologi pertanian adalah melalui pameran. Melalui pameran Balitbangtan

Kementerian Pertanian melalui BPTP Kalimantan Timur dapat memperkenalkan, menggelar, atau mempertunjukkan jasa atau hasil-hasil pengkajian kepada masyarakat. Sebagai salah satu cara berkomunikasi massal, maka penyajiannya didukung dengan banyak media, baik itu media cetak (foto, poster, leaflet, buku dan brosur), media elektronik (video, realia (bahan olahan/hasil produksi pasca panen) dan demonstrasi (adanya plot cara tanam dan plot cara beternak).

a. Kaltim Fair 2017

Kaltim Fair 2017 dilaksanakan di Convention Hall Samarinda pada 14-23 April 2017. Adapun tahapan perencanaan, persiapan, pengumpulan dan penyiapan materi, pencetakan materi diseminasi dimulai sejak satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

BPTP Kaltim sebagai salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian mempunyai tupoksi dalam hal penyebar luaskan informasi inovasi teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, melalui kegiatan Pengembangan Sumberdaya Informasi, Komunikasi, Diseminasi dan Jaringan Umpan Balik.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dihasilkan tersebut perlu diinformasikan kepada masyarakat sebagai sasaran program agar paham dan mau mengadopsi serta mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui kegiatan Komunikasi Inovasi Teknologi Pertanian dalam rangka akselerasi dan peningkatan efektifitas pemasyarakatan inovasi hasil pengkajian dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan Komunikasi inovasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung implementasi konsep Litkajibang-diklatluh-rap.

Penggunaan multi metode dan media dalam kegiatan diseminasi menggunakan implementasi prinsip Spektrum Diseminasi Multy Channel (SDMC). Sedangkan prinsip yang digunakan dalam penerapan metode komunikasi/diseminasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yaitu (i) karakteristik sasaran (peserta didik/orang yang akan belajar), (ii) tujuan perubahan perilaku dari sasaran yang diinginkan, (iii) materi yang disampaikan (isi pesan) dan (iv) metode. Tidak ada satupun metoda yang dapat menjangkau dan sekaligus mempengaruhi semua orang. Dengan demikian pemilihan metode harus digunakan secara kombinasi yang efektif.

Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

1. Menyusun tim pelaksana (team work) yang terdiri dari inter dan multi disiplin (penyuluh dan peneliti serta teknisi).
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait (stakeholders) dan berbagai pihak/kelompok pengguna akhir (petani/pelaku agribisnis) untuk memperoleh umpan balik dari materi diseminasi yang akan dihasilkan.
3. Inventarisir/pengumpulan materi dan bahan yang akan di display.

b. Pelaksanaan

1. Melakukan identifikasi/inventarisasi berbagai program, kegiatan, dan paket teknologi hasil penelitian dan pengkajian yang telah dihasilkan oleh BPTP Kaltim maupun lembaga penelitian sejenis.
2. Jika diperlukan akan dilakukan karakterisasi wilayah yang akan menjadi sasaran kegiatan, yaitu wilayah yang potensial untuk pengembangan pertanian. Kegiatan ini untuk memperoleh data dan informasi mengenai: (1) potensi wilayah, (2) permasalahan pertanian dan (3) kebutuhan teknologi/ informasi bagi pengguna yang dilakukan secara partisipatif.
3. Dilanjutkan dengan analisis terhadap kelompok pengguna potensial dari hasil litkaji agar penyediaan materi/bahan informasi hasil litkaji sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pengguna.
4. Merumuskan tujuan, memperjelas proses belajar apa yang akan dicapai oleh media yang akan dibuat. Tujuan instruksional yang bersifat kognitif, psikomotor, afektif, desain pesan.
5. Menyusunan materi dan bahan informasi.
6. Menetapkan dan mendesign strategi komunikasi dan diseminasi yang paling efektif dan efisien (cost effective) sehingga dapat meningkatkan adopsi dan difusi hasil litkaji serta pemanfaatan hasil litkaji dalam program pengembangan kegiatan institusi (stakeholders) yang terkait.
7. Menetapkan media komunikasi yang digunakan dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, latar belakang sosial ekonomi dan budaya sasaran, ketersediaan sumberdaya, bahan dan peralatan, sehingga dapat menentukan format atau bentuk penyajian materi informasi hasil

litkaji yang akan didiseminasikan, dipromosikan, dan dikomersialisasikan oleh BPTP Kaltim.

Alat dan Bahan

Bahan dan perlengkapan kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Kertas berbagai jenis dan ukuran (Premium paper, Glossy, foto, HVS, dll)
2. Bahan alat tulis
3. Tinta (inkjet, toner, sablon, pewarna dll)
4. Elektronik stored (Hard disk, CD-R,Flashdisk)

Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

1. Peralatan multi media yang terdiri dari: computer, printer, scanner, camera digital, camera video, video player, dan video projector.
2. Audio sistem
3. Peralatan percetakan : Plotter, Paper cutter, Sablon set
4. Peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya.

Pelaksanaan

Di awal tahun anggaran 2017 BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur menjadi peserta pelaksana pada event Kaltim Fair. Kegiatan ini seyogyanya diikuti oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian, untuk itu BPTP sebagai salah satu unit kerja Balitbangtan Kementerian Pertanian di daerah berperan sebagai peserta pelaksana yang bertugas mengisi materi pada stand Balitbangtan.

Kaltim Fair merupakan rangkaian event kegiatan yang dikemas dalam bentuk pameran, event ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT Provinsi Kalimantan Timur ke-60 tahun 2017. Pameran itu sendiri merupakan salah satu media penyuluhan untuk mendesiminasikan hasil pengkajian yang dilakukan oleh BPTP Kalimantan Timur. Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti "tengah", "perantara", atau "pengantar", yaitu perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. The Association for Educational Communications Technology (AECT), menyebutkan media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Gagne (1970), mengatakan bahwa

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan sasaran yang dapat merangsang untuk belajar, sedangkan "penyuluhan" berasal dari kata "suluh" yaitu sesuatu yang digunakan untuk memberi penerang. Jadi media penyuluhan adalah suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran, agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas.

Beragamnya media memiliki karakteristik yang berbeda pula. Karena itu untuk setiap tujuan yang berbeda diperlukan media yang berbeda pula. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, maka media berfungsi sebagai saluran penyampaian pesan. Media penyuluhan pertanian sebagai alat komunikasi untuk memindahkan fakta, gagasan, pendapat dari penyuluh kepada petani sehingga terjadi perpindahan sesuatu dari pikiran seseorang (penyuluh) kepada petani.

Media penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan, memperjelas pemahaman petani dalam menerima informasi. Media penyuluhan pertanian erat kaitannya dengan alat bantu atau alat peraga yang dapat digunakan dalam penyuluhan untuk meningkatkan efektivitas metoda dan mempercepat diterimanya informasi. Sejalan dengan hal itu, maka pameran yang diikuti oleh BPTP Kalimantan Timur memiliki misi untuk:

1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada pengunjung mengenai tugas dan fungsi BPTP serta penyajian dan memperagakan hasil-hasil litkaji yang telah dicapai,
2. Mensosialisasikan dan advokasi peran BPTP sebagai sumber teknologi dan informasi pertanian di provinsi Kalimantan Timur,
3. Menjadikan BPTP sebagai sumber informasi dan rujukan teknologi pertanian yang inovatif.

Adapun tema yang di angkat oleh BPTP Kalimantan Timur dalam Kaltim Fair 2017 yaitu beberapa inovasi teknologi pertanian dalam rangka mensukseskan program gerakan tanam (Gertam) Cabai di Kalimantan Timur. Untuk itu materi yang disajikan terkait dengan informasi agro inovasi pertanian; demonstrasi, peragaan inovasi teknologi pertanian, dan aneka produk hasil pertanian dan olahan.

Sementara itu media yang digunakan untuk mendukung keikutsertaan BPTP Kalimantan Timur, adalah media yang bisa memberikan berbagai informasi dan materi inovasi teknologi pertanian hasil penelitian/ pengkajian dalam bentuk : (1) Realia/ contoh produk : benih/ bibit unggul beserta teknologi pendukungnya, (2) Media informasi tercetak dalam bentuk liflet, poster, buku, (3) Media elektronik seperti CD dan online, (3) Produk hasil pertanian dan produk olahan hasil pertanian.

b. Bimbingan Teknis

Salah satu bentuk kegiatan desiminasi BPTP Kalimantan Timur yaitu kegiatan Bimbingan Teknis. Kegiatan ini dilaksanakan mendukung peningkatan produksi kedelai nasional ini dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR-RI (Hj. Kasriyah, SE), akademisi (Universitas Padjajaran, Universitas Kutai Kartanegara), penyuluh pertanian, petugas lapang, petani dan penangkar yang berada di wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bimtek yang dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun perbenihan tahun 2017/2018 dilakukan dalam bentuk pendampingan teknologi dan pembinaan kepada para Penyuluh, Penyuluh Swadaya, petani Penangkar. Melalui bimtek, diharapkan peran penyuluh dalam mensukseskan pencapaian swasembada di sektor pertanian dapat ditingkatkan.

Bimtek kali ini juga merupakan menjadi bagian dari penancangan pemerintah untuk mendistribusikan benih unggul kepada petani dan menyiapkan petani membuat dan menjual benih unggul tersertifikat. Untuk itu pada kesempatan tersebut dibagikan benih kedelai, benih jagung, bibit cabai sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pencapaian swasembada di sektor pertanian.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Koordinasi dilaksanakan di Forum pertemuan diawali dengan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait di daerah baik secara langsung maupun via telepon.
- b. Kegiatan diseminasi teknologi hasil penelitian dan pengkajian telah dilakukan dalam bentuk siaran di media massa (TV, Radio, Website, dan Medsos).
- c. Percepatan penyebaran inovasi pertanian di Provinsi Kaltim dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan stakehoders serta meningkatkan kapasitas penyuluh.

5.2. Saran

Pada tahun berikutnya diharapkan temu koordinasi bisa memberikan hasil yang lebih dalam peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sebagai salah satu ujung tombak penentu keberhasilan kegiatan di sektor pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicondro, G.J. 1990. *Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Orang Kecil*. Bina Darma No. 28 (1990)
- Anonimus. 2005. Pembangunan Pertanian. (dalam <http://www.pelitakarawang.com> 2010/ 07/ [pengembangan-sdm-pertanian-dalam.html](http://www.pelitakarawang.com)), diakses tgl. 27 september 2012.
- Biro Hukum Dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. 2015. *Legislasi Mendukung Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Tebu Dan Daging*. PPMKP Kompleks Mega, Bogor.
- Butt, H.W. 1961. *Principles and Philosophy of Extension Education* in Kammath, Extension education in Community Development.
- Dahama, O.P. and O.P Bhatnagar. 1980. *Education and Cmmunication for Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing CO.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2005. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Jakarta.
- Ensminger, D. 1962. *Need for Extension Training* in Kammath, Extension Education in Community Development.
- <http://bpkbinuang.blogspot.co.id/2014/05/pedoman-sistem-kerja-latihan-dan-kunjungan/>
- <http://sekarmadjapahit.wordpress.com/2012/01/30/tanam-padi-sistem-jajar-legowo/>
- Kelsey, L.D. and C.C. Hearne. 1955. *Cooperative Extension Work Ithaca*. Comstcok Publishing Associates.
- Loekman Soetrisno. 1989. *"Pokok-pokok Pembahasan Makalah Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia"*. Bahasan disajikan pada Kongres Perhiptani ke-1, di Subang, 4-6 Juli 1987.
- Mathews. JL. 1973. *The Place of Education in Extension* in D. Byrn, Evaluation in Extension USA: USDA.
- Margono Slamet. 1989. *"Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian"*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mardikanto. T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2005. *Keberadaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/ Kota*. Jakarta.

- Ridha. 2005. *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Soekandar W. 1976. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*, CV. Yasaguna, Jakarta.
- Soedijanto. 2005. *Kebijaksanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 2006 dan ke Depan*. Departemen Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta.
- UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian. 2004. *Pertemuan Koordinasi Penyuluhan Pertanian*. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Zakaria. 2006. *Modul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian*. Pusat Manajemen Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanian, Ciawi. Bogor.